

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Kota Cimahi sebagai wilayah non-IHK menggunakan Indeks Perkembangan Harga (IPH) sebagai proksi inflasi. IPH mengalami lonjakan tertinggi pada minggu kedua Maret 2025 sebesar 4,301% akibat meningkatnya permintaan selama awal Ramadan, sementara stok terbatas. Komoditas penyumbang utama kenaikan harga meliputi daging ayam ras, telur ayam ras, dan cabai rawit merah. Risiko ke depan tetap berkisar pada momen keagamaan, terganggunya distribusi, serta pengaruh perilaku pedagang.

Kota Cimahi sebagai wilayah **non-IHK** mengacu pada **Indeks Perkembangan Harga (IPH)** yang dihitung BPS sebagai proksi inflasi daerah.

- Kenaikan IPH tertinggi terjadi pada **Minggu ke-2 Maret 2025**, mencapai **4,301%**, dipicu oleh meningkatnya permintaan saat **awal Ramadan**, serta stok barang yang terbatas.
- Komoditas penyumbang utama IPH pada periode ini adalah:
 - **Daging ayam ras,**
 - **Telur ayam ras,**
 - **Cabai rawit merah.**

Sebaliknya, deflasi terdalam terjadi pada **September Minggu ke-4** disebabkan oleh **panen raya komoditas strategis** di daerah produsen dan menurunnya permintaan lokal.

Risiko ke depan yang perlu diantisipasi antara lain:

- Fluktuasi musiman jelang **Idul Fitri dan tahun ajaran baru,**
- Gangguan distribusi bahan pokok,
- Ketergantungan pada daerah penghasil untuk komoditas strategis seperti cabai dan bawang.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Permasalahan utama meliputi terbatasnya distribusi dan stok barang kebutuhan pokok

menjelang hari besar, keterlambatan data real-time harga, serta belum meratanya pemahaman pedagang terhadap stabilisasi harga. Selain itu, berkurangnya beras SPHP di pasar menyebabkan lonjakan harga beras medium.

Beberapa isu utama yang teridentifikasi:

- **Harga beras medium dan premium di atas HET** (Harga Eceran Tertinggi) selama bulan Februari.

Contoh: Harga beras medium tembus **Rp13.000** dan premium **Rp15.500**, melebihi HET Rp12.500 dan Rp14.900.

- **Tidak beredarnya Beras SPHP sejak 6 Februari 2025**, menyebabkan tekanan pada harga beras lain.
- **Perilaku pedagang yang menaikkan harga menjelang hari besar keagamaan**, tanpa alasan stok yang kuat.
- **Keterlambatan realisasi program strategis** (seperti bantuan sarana urban farming dan kegiatan budidaya cabai), karena turunnya dana di akhir triwulan.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

TPID Kota Cimahi melaksanakan sejumlah strategi antara lain: Operasi Pasar Murah (GPM), pemantauan harga harian melalui aplikasi e-Pasar, koordinasi lintas daerah untuk menjamin pasokan, dan program Urban Farming. Program *BeRCItRA* ASN juga diluncurkan untuk mendorong ASN berbelanja di pasar rakyat dengan metode pembayaran digital (QRIS).

TPID Kota Cimahi melakukan berbagai aksi nyata, antara lain:

- **Pemantauan harga dan stok secara harian** melalui aplikasi **e-Pasar** dan **SILINDA Jabar** di 3 pasar rakyat.
- **Pelaksanaan 5 kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM)**, seperti:
 - 14 dan 26 Februari 2025 (di Baros dan pasar lainnya)
 - 13 dan 26 Maret 2025 menjelang Idul Fitri.
- **Operasi Pasar dan sidak distributor** dilaksanakan menjelang Lebaran.

Koordinasi dengan daerah penghasil dan pemberian subsidi transportasi:

- Telah diberikan **2 kali bantuan transportasi** untuk menjaga kelancaran pasokan.
- **Gerakan Menanam dan Urban Farming** dilakukan di awal tahun, termasuk **panen cabai** di akhir Februari.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Evaluasi menunjukkan efektivitas intervensi seperti GPM dan kerja sama antardaerah dalam menurunkan IPH, terutama pada Desember 2024. Namun, keterlambatan realisasi anggaran dan pelaksanaan kegiatan masih menjadi kendala, misalnya pada program budidaya cabai dan pendampingan UMKM yang belum berjalan optimal di Triwulan I.

Evaluasi menunjukkan bahwa:

- **Penurunan IPH dari 4,301% (Maret Minggu ke-2) menjadi lebih rendah di akhir bulan Maret**, menunjukkan efektivitas intervensi seperti GPM, sidak, dan koordinasi pasokan.
- **Program BeRCItRA ASN** (ASN Cimahi Cinta Pasar Rakyat) diluncurkan dan mulai rutin setiap Jumat minggu ke-2, menyasar 25% ASN tiap OPD:
 - ASN diminta belanja menggunakan **QRIS** di pasar rakyat (Pasar Atas, Melong, Cimindi).
 - Program ini juga mendukung **digitalisasi pasar dan ekonomi lokal**.
- Namun, **realisasi anggaran kegiatan urban farming, pendampingan UMKM, dan penyuluhan pertanian** belum maksimal di Triwulan I, karena beberapa kegiatan dijadwalkan pada semester II.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Beberapa rekomendasi untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan ke depan:

- **Mempercepat realisasi anggaran dan pelaksanaan kegiatan urban farming dan budidaya hortikultura.**

Catatan: 5,39 hektar lahan disiapkan untuk budidaya cabai, namun realisasi masih minim di triwulan I.

◦

- **Meningkatkan pelibatan pelaku usaha dan pedagang dalam menjaga stabilitas harga**, melalui pendekatan komunikasi dan edukasi langsung.
- **Optimalisasi program digitalisasi pasar dan pelatihan UMKM**, khususnya untuk mendorong adopsi e-commerce dan pencatatan keuangan digital.
- **Penguatan koordinasi lintas OPD dan lintas daerah** untuk mengantisipasi lonjakan harga musiman.
- **Perluasan program BeRCItRA ASN** serta penambahan event bazar murah dengan sinergi BUMD/BUMDesa dan koperasi lokal.